

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA

*Gross Regional Domestic Product
of Bima Regency by Expenditure*

2016 - 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA**
Statistics of Bima Regency

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN

KABUPATEN BIMA

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure
of Bima Regency*

2016-2020

<https://bimakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA**

KATALOG DALAM PENERBITAN

Catalogue in Publication

Judul/ : **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut**
Title **Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020/***Gross Regional*
Domestics Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2016-2020

ISSN : **2527-7928**

No. Publikasi/ : **52060.2104**
Publication Number

Ukuran Buku/ : **21 cm x 29 cm**
Book Size

Jumlah Halaman/ : **viii + 63**
Total Pages

Naskah/ : **Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/**
Manuscript *Section of Regional Account Statistics and Statistics Analysis*

Diterbitkan Oleh/ : **Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima/**
Published By *BPS – Statistics of Bima Regency*

Dicetak Oleh/ : **CV. MAHARANI**
Printed By

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020

*Gross Regional Domestic Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2016-2020*

PENGARAH

Ir. Muhadi

PENANGGUNG JAWAB

Setiawan Kusmayudi, SE

PENULIS DAN PENGOLAH DATA

Roshan Fikri, S.ST

EDITOR

M. Ilhamuddin, S.ST

GAMBAR KULIT

Gde Ari Sudana, S.Si

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekonomi ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan perhitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bima, April 2021
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA
Kepala,

Ir. Muhadi
NIP. 19661231 199401 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Katalog Dalam Penerbitan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Pengeluaran	12
2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori (PI)	19
2.6 Ekspor dan Impor	22
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BIMA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2020	23
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	32
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	32
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	37
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori	40
3.2.6 Perkembangan Ekspor	42
3.2.7 Perkembangan Impor	43

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2020	46
4.1	PDRB (Nominal)	46
4.2	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	47
4.3	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	48
4.4	Perbandingan PDRB terhadap Impor	49
4.5	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	50
4.6	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	51
4.7	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	52
	 PENUTUP	 54
	LAMPIRAN	56
	DAFTAR PUSAKA	61

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	25
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	26
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	28
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	30
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	31
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	31
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	33
Tabel 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	34
Tabel 9	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	35
Tabel 10	Pertumbuhan Implisit (Indeks harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	36
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	36
Tabel 12	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	38
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	41
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	42
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	43
Tabel 16	Perkembangan Impor Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	45
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	46
Tabel 18	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	47

Tabel 19	Rasio Ekspor terhadap PMTB (Atas Dasar harga Berlaku) Tahun 2016-2020	48
Tabel 20	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	49
Tabel 21	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	50
Tabel 22	Neraca Perdagangan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	52
Tabel 23	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bima Tahun 2016-2020	53

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020..... 25
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020..... 27
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020..... 27
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020..... 29
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020..... 30

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (Miliar Rupiah)	57
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (Miliar Rupiah)	58
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (persen)	59
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (persen)	60

<https://bimakab.bps.go.id>



BAB I
PENDAHULUAN

<https://bimakab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat didalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (final output)”**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama dibidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- **Metodologi**

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



BAB II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bimakab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dibidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang takterpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nigari yang ada di wilayah kabupaten/kota;b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-Pkabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasiP K-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output - Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

- Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ;dan data ternak, Ditjennak Kementan.

V Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t)}}$ - $\frac{\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t-1)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
BIMA MENURUT PDRB PENGELUARAN
2016-2020

<https://bimakab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku di tahun 2020 meningkat sebesar 25,05 persen, yakni dari 9.130,54 miliar Rupiah pada tahun 2016 menjadi 11.417,67 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih kecil, yakni dari 7.143,34 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 7.946,59 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 11,24 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Bima periode 2016-2019 dapat tetap tumbuh di atas 4 persen, yakni sebesar 5,30 persen; 6,27 persen; 4,04 persen dan 4,26 persen. Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bima tumbuh sebesar -3,49 persen, atau mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yakni sebesar 16,25 persen. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yang menyumbang sebesar 0,98 persen.

Pada periode tahun 2016-2019 PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 9.130,54 miliar Rupiah (2016); 10.030,69 miliar Rupiah (2017); 10.832,08 miliar Rupiah (2018); dan 11.631,42 miliar Rupiah (2019). Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku mengalami penurunan menjadi 11.417,67. Penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Nilai PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bima pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

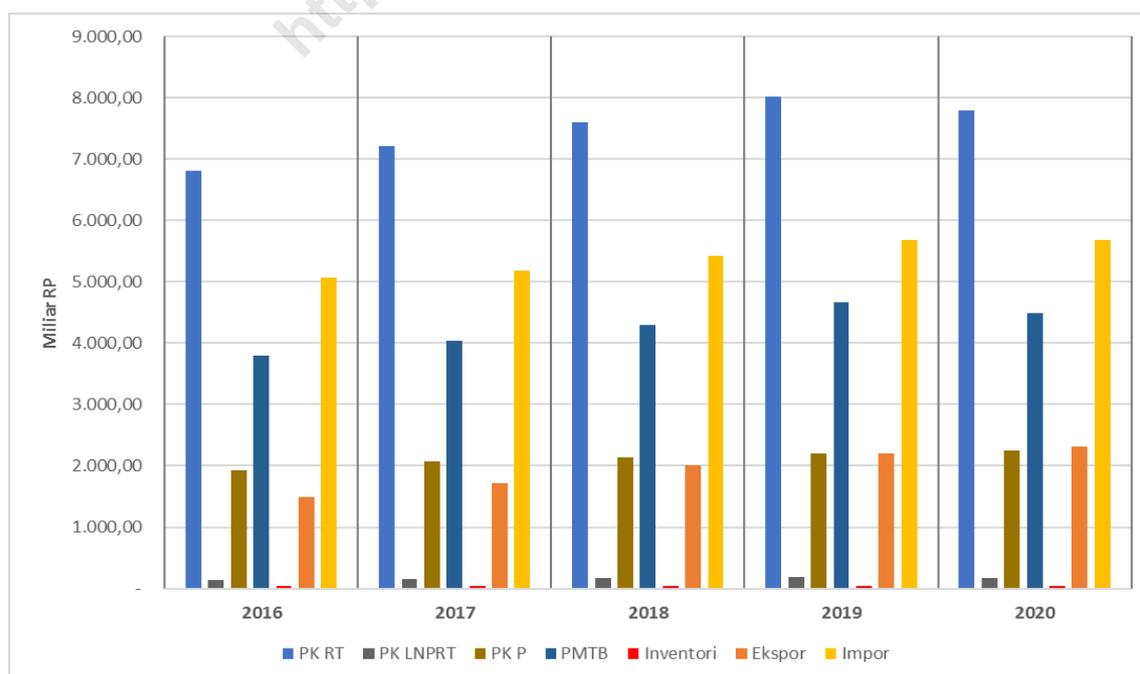
**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2016 - 2020**
*Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Region Bima.
2016-2020*

(Miliar Rp/Trillion Rp)					
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	6.890,98	7.216,35	7.593,48	8.014,82	7.798,81
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	138,89	152,53	169,10	179,44	177,99
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.927,40	2.067,85	2.137,93	2.205,40	2.256,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.798,17	4.033,80	4.303,20	4.669,42	4.495,91
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	36,48	37,70	46,47	48,10	48,97
6. Ekspor/ <i>Export</i>	1.493,01	1.713,04	1.999,92	2.196,90	2.319,35
7. Impor/ <i>Import</i>	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
PDRB / GRDP	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2016 - 2020**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bima pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2016 - 2020**
*Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Bima
2016-2020*

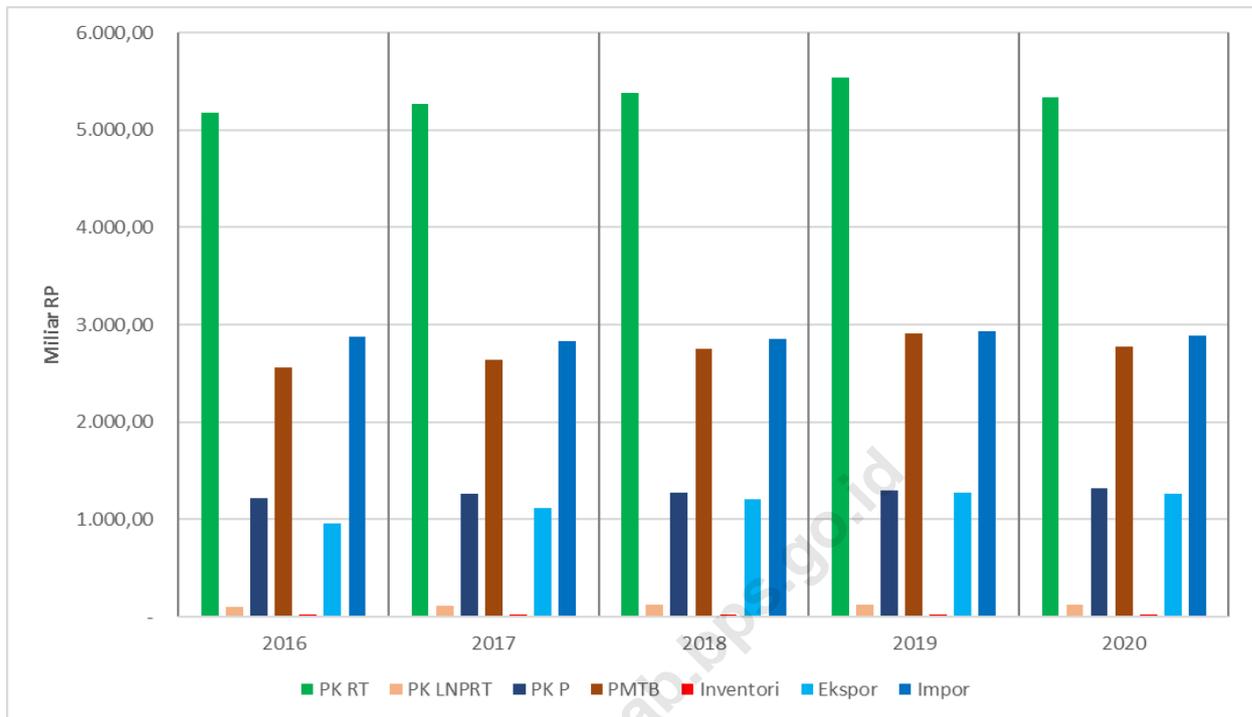
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Miliar Rp/ <i>Trillion Rp</i>)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	5.173,69	5.270,97	5.381,98	5.537,92	5.340,05
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	105,09	111,21	119,04	123,14	121,13
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.213,67	1.263,32	1.279,23	1.302,15	1.314,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.558,38	2.644,79	2.747,42	2.910,12	2.771,54
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	18,93	19,27	23,27	23,56	23,44
6. Ekspor/ <i>Export</i>	954,42	1.114,47	1.204,53	1.273,90	1.268,15
7. Impor/ <i>Import</i>	2.880,83	2.833,13	2.857,69	2.936,92	2.892,69
PDRB / GRDP	7.143,34	7.590,91	7.897,79	8.233,87	7.946,59

*) Angka Sementara

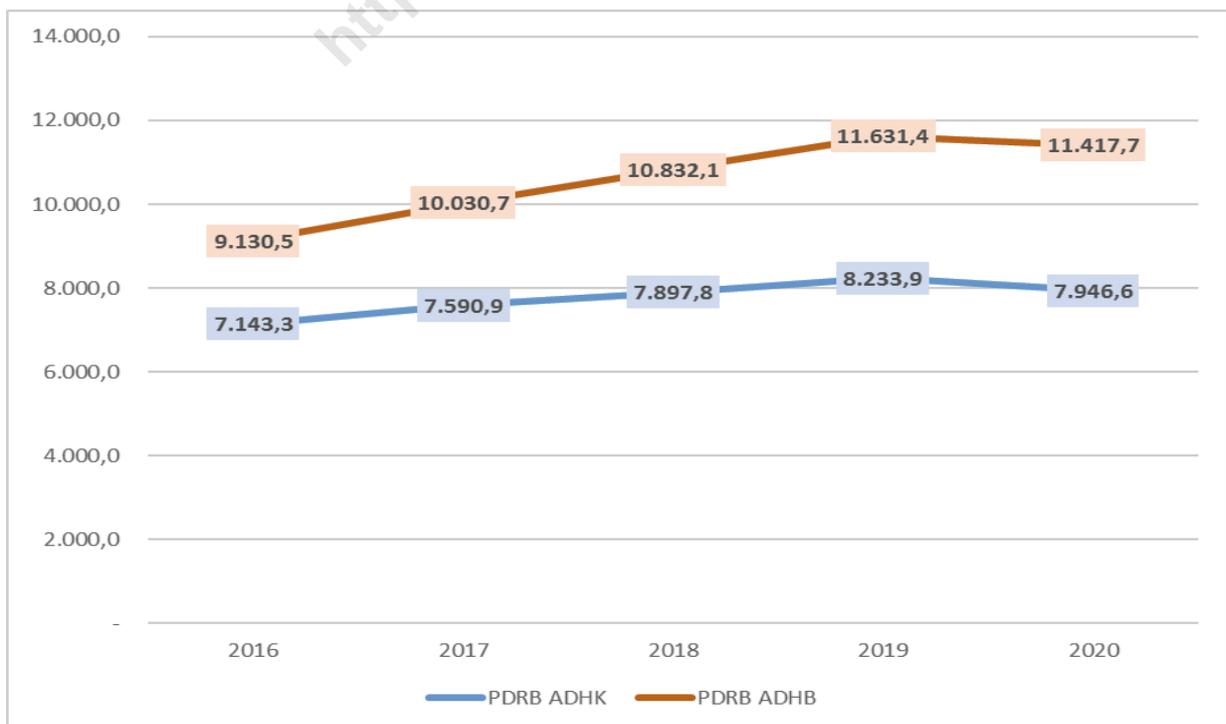
**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bima pada periode tahun 2016–2019 meningkat, yakni sebesar 7.143,34 miliar Rupiah (2016); 7.590,91 miliar Rupiah (2017); 7.897,79 miliar Rupiah (2018); dan 8.233,87 miliar Rupiah (2019). Pada tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan menurun menjadi 7.946,59 miliar Rupiah atau mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kabupaten Bima Menurut Pengeluaran, 2016 - 2020



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 - 2020
Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Region Bima. 2016-2020

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74,58	71,94	70,10	68,91	68,30
1. Konsumsi LNPRIT	1,52	1,52	1,56	1,54	1,56
2. Konsumsi Pemerintah	21,11	20,62	19,74	18,96	19,77
3. PMTB	41,60	40,21	39,73	40,1	39,38
4. Perubahan Inventori	0,40	0,38	0,43	0,41	0,43
5. Ekspor	16,35	17,08	18,46	18,8	20,31
6. Impor	55,56	51,75	50,02	48,8	49,75
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

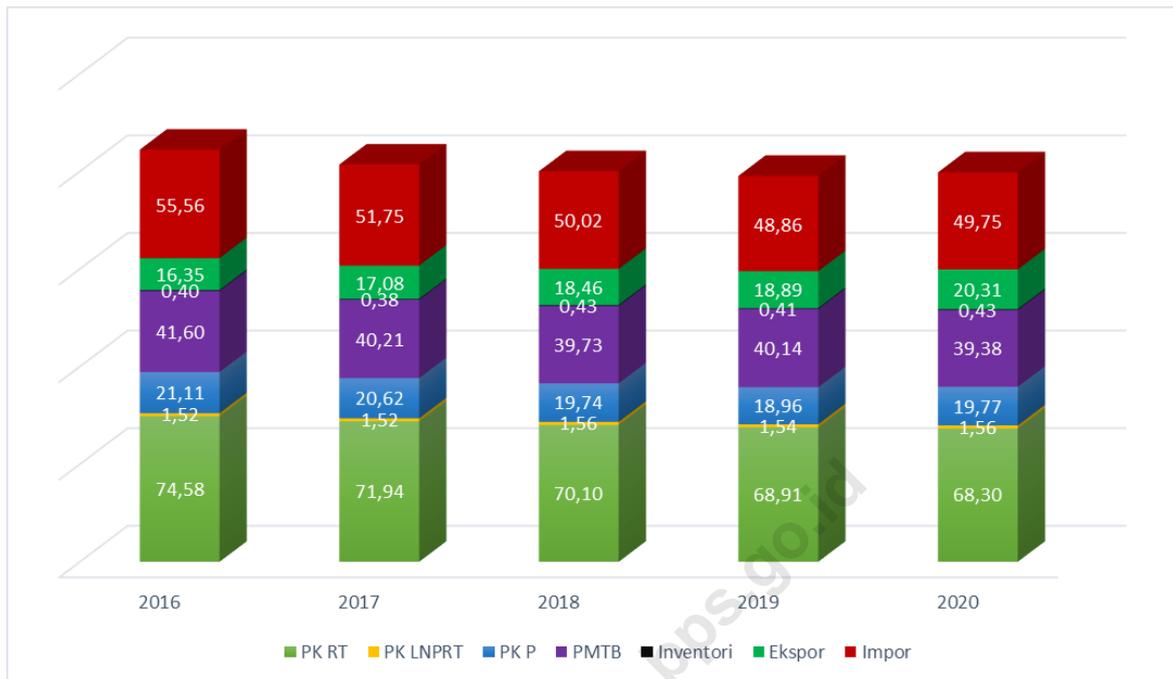
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRIT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Bima, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 39,72 hingga 41,60 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sebesar 16,35 hingga 20,31 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sebesar 48,48 hingga 55,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima Tahun 2019



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 19 hingga 21 persen seperti yang terlihat pada grafik 4. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2016-2020 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “minus”. Posisi minus tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2016-2019 perekonomian Kabupaten Bima terus mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 5,30 persen (2016); 6,27 persen (2017); 4,04 persen (2018); dan 4,26 persen (2019). Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar 3,49 persen. Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat tren laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima, 2016 - 2020

Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Bima, 2016-2020

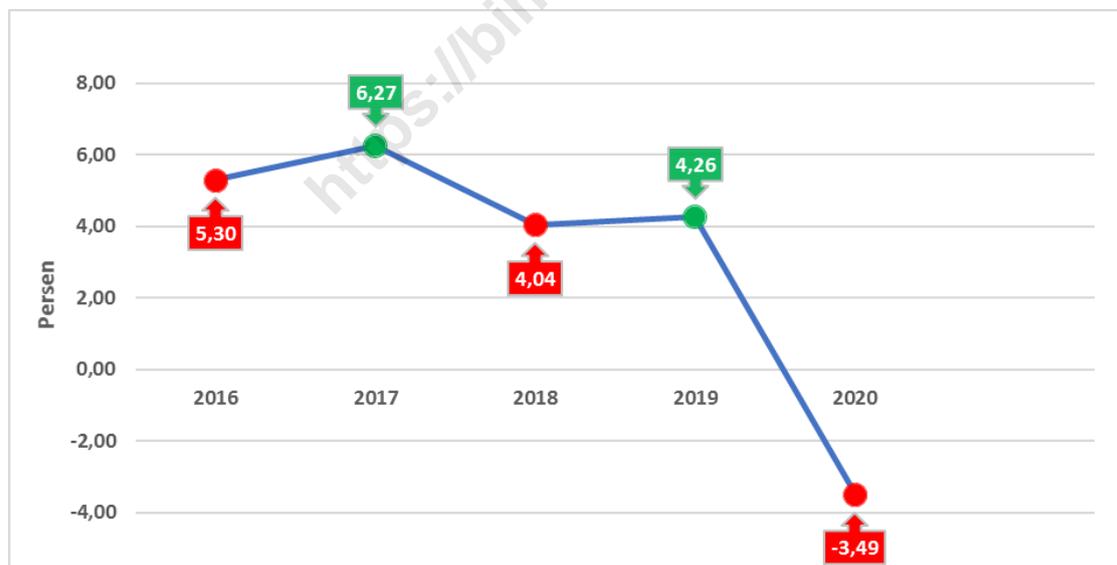
(persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,64	1,88	2,11	2,90	(3,57)
2. Konsumsi LNPRT	4,15	5,82	7,04	3,44	(1,63)
3. Konsumsi Pemerintah	1,01	4,09	1,26	1,79	0,98
4. PMTB	7,26	3,38	3,88	5,92	(4,76)
5. Perubahan Inventori	30,02	1,81	20,77	1,25	(0,52)
6. Ekspor	7,06	16,77	8,08	5,76	(0,45)
7. Impor	(0,67)	(1,66)	0,87	2,77	(1,51)
Total PDRB	5,30	6,27	4,04	4,26	(3,49)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat

⁶ Indeks perkembangan

tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016–2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 – 2020

Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Bima Region 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	131,62	136,91	141,09	144,73	146,04
2. Konsumsi LNPRT	132,16	137,16	142,06	145,72	146,94
3. Konsumsi Pemerintah	158,81	163,68	167,13	169,37	171,63
4. PMTB	148,46	152,52	156,63	160,45	162,22
5. Perubahan Inventori	192,76	195,67	199,71	204,15	208,95
6. Ekspor	156,43	153,71	166,03	172,45	182,89
7. Impor	176,09	183,21	189,59	193,49	196,37
Total PDRB	127,82	132,14	137,15	141,26	143,68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 - 2020

Table 5. Source of Growth of GRDP by Expenditure, Bima Region 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,84	4,35	2,75	2,86	(2,34)
2. Konsumsi LNPRT	0,08	0,09	0,06	0,06	(0,05)
3. Konsumsi Pemerintah	0,90	1,04	0,65	0,67	(0,58)
4. PMTB	1,90	2,18	1,41	1,50	(1,22)
5. Perubahan Inventori	0,01	0,02	0,01	0,01	(0,01)
6. Ekspor	0,71	0,92	0,62	0,66	(0,56)
7. Impor	2,14	2,34	1,46	1,52	(1,27)
PDRB	5,30	6,27	4,04	4,26	(3,49)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bima untuk periode 2016 – 2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bima ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bima maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga turun sebesar 3,57 persen. Pandemi covid-19 menjadi salah satu pendorong turunnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Selama periode 2016 – 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung menurun, yaitu 74,58 persen (2016); 71,94 persen (2017); 70,10 persen (2018); 68,91 persen (2019) dan 68,30 persen (2020). Walaupun proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap PDRB semakin berkurang tetapi dilihat dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan tahun 2010) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bima

Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of Bima Region 2015 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga	6.809,50	7.216,36	7.593,48	8.014,82	7.798,81
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.173,69	5.270,97	5.381,98	5.537,92	5.340,05
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	74,58	71,94	70,10	68,91	68,30
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	58.050,99	60.843,12	63.320,15	65.544,30	63.364,77
b. ADHK 2010	44.105,71	44.441,02	44.879,05	45.288,44	43.387,49
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	14.369,36	15.066,50	15.692,22	16.404,42	15.812,73
b. ADHK 2010	10.917,49	11.004,87	11.122,08	11.334,79	10.827,39
Pertumbuhan ⁷ (persen)					
a. Total Konsumsi RT	1,64	1,88	2,11	2,97	(3,57)
b. Per-RT	0,77	0,76	0,99	0,91	(4,20)
c. Perkapita	0,52	0,80	1,07	1,91	(4,48)
Jumlah RT (unit)	117.302	118.606	119.922	122.281	123.078
Jumlah penduduk (org)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, setiap rumahtangga di Kabupaten Bima menghabiskan dana sekitar 58.050,99 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga pada nilai konsumsi per rumahtangga 65.544,30 ribu Rupiah (2019) dan turun menjadi 63.364,77 ribu Rupiah (2020). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran diatas 2,15 persen pada periode 2016-2019, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,97 persen. Sedangkan tahun 2020 konsumsi rumahtangga per rumah tangga dan per-kapita mengalami kontraksi sebesar 4,20 persen dan 4,48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bima menurun, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga Konstan sebesar 1,64 persen pada tahun 2016. Kemudian terus mengalami pertumbuhan positif pada tahun berikutnya yaitu sebesar 1,88 persen (2017), 2,11 persen (2018) dan 2,97 persen (2019). Kemudian pada tahun 2020 konsumsi rumahtangga mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa pandemi covid-19 menjadi penyebab turunnya pengeluaran konsumsi masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bima 2016-2020

Table 8. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Bima Region 2016-2020

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	38,68	38,61	38,53	38,61	39,15
Pakaian dan Alas Kaki	2,27	2,22	2,22	2,24	2,31
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	19,72	19,91	20,18	20,25	21,11
Kesehatan & Pendidikan	7,75	7,93	8,03	8,14	8,52
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,39	16,01	15,86	15,61	13,74
Hotel & Restoran	5,10	5,26	5,14	5,09	4,86
Lainnya	10,08	10,05	10,05	10,06	10,29
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terlihat pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Bima, bahwa konsumsi bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan konsumsi untuk makanan. Proporsi konsumsi makanan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berkisar pada angka 38 persen, tidak banyak mengalami perubahan.

Pola proporsi konsumsi diatas tidak menunjukkan pergeseran yang cukup berarti dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan ataupun sebaliknya. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi dalam masyarakat.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima, Tahun 2016-2020
Table 9. Real Growth of Household Final Consumption Expenditure, Region Bima 2016-2020

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,34	1,20	0,90	2,24	(1,88)
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,59	-0,01	1,86	2,89	(1,78)
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,03	0,92	3,53	4,24	1,36
d. Kesehatan & Pendidikan	2,68	3,66	2,85	4,28	0,68
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,98	2,68	3,03	3,01	(14,38)
f. Hotel & Restoran	4,39	6,26	1,59	2,05	(7,48)
g. Lainnya	0,98	1,86	2,14	2,71	(1,37)
Total Konsumsi	1,64	1,88	2,11	2,97	(3,57)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riil, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,34 persen (2016); 1,20 persen (2017), 0,90 persen (2018), 2,24 persen (2019) dan -1,88 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2020 tertinggi terjadi pada kelompok konsumsi Kesehatan dan Pendidikan, yaitu sebesar 0,68 persen. Sedangkan pertumbuhan konsumsi terendah, yaitu pada kelompok konsumsi Transportasi,

Komunikasi, Rekreasi dan Budaya, sebesar -14,38 persen. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (*volume*) dari waktu ke waktu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran rumahtangga. Peningkatan harga tertinggi untuk total pengeluaran konsumsi rumahtangga terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,59 persen dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,91 persen. Pada tahun 2020, sebagian besar sub komponen mengalami inflasi yang relatif rendah, utamanya pada sub komponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya sebesar 0,06 persen.

Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bima, Tahun 2016-2020

Table 10. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Bima Region 2016-2020

(persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,71	4,51	4,07	3,44	0,57
b. Pakaian dan Alas Kaki					
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,32 5,79	3,85 6,00	3,23 3,02	3,42 1,62	2,31 0,09
d. Kesehatan & Pendidikan	6,74	4,54	3,63	2,61	1,15
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	(1,75)	0,83	1,14	1,26	0,06
Hotel & Restoran	5,56	2,88	1,07	2,52	0,47
g. Lainnya	6,74	3,80	2,95	2,91	0,94
Total Konsumsi	4,59	4,02	3,06	2,58	0,91

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam

kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bima, 2016-2020
Table 11. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Bima Region 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB(Miliar Rp)	138,89	152,53	169,10	179,44	177,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	105,09	111,21	119,04	123,14	121,13
Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB)	1,52	1,52	1,56	1,54	1,56
Laju pertumbuhan(persen)	4,15	5,82	7,04	3,44	(1,63)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT sebesar 138,89 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 152,53 miliar rupiah (2017), 169,10 miliar rupiah (2018), 179,44 miliar rupiah (2019) dan 177,99 miliar rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami fluktuatif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,04 persen.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu

adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima 2016-2020
Table 12. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Region Bima 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB(Miliar Rp)	1.927,40	2.067,85	2.137,93	2.205,40	2.256,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.213,67	1.263,32	1.279,23	1.302,15	1.314,97
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	21,11	20,62	19,74	18,96	19,77
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.067,20	4.317,31	4.418,12	4.513,93	4.576,00
b. ADHK 2010	2.561,08	2.637,60	2.643,59	2.665,19	2.666,21
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	222.950	251.625	260.152	281.229	295.479
b. ADHK 2010	140.390	153.726	155.662	166.048	172.162
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi pemerintah	1,01	4,09	1,26	1,79	0,98
b. Konsumsi perkapita	(0,10)	2,99	0,23	0,82	0,04
c. Konsumsi per-pegawai	13,21	9,50	1,26	6,67	3,68
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁸	8.645	8.218	8.218	7.842	7.638
Jumlah penduduk (org)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁸ Tidak termasuk polisi dan militer

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,09 persen. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB semakin berkurang, dari 21,11 persen (2016) hingga mencapai 19,77 persen (2020). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 18,96 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 21,11 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

Konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Berkurangnya jumlah pegawai pemerintah pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 dan meningkatnya jumlah konsumsi pemerintah dari tahun ke tahun menjadi salah satu alasan. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016, sebesar 13,21 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi dimana pertumbuhan PMTB tertinggi

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,26 persen dan terendah pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar 4,76 persen.

PMTB memiliki peranan penting dalam penyusunan PDRB dimana PMTB memiliki kontribusi dalam kurun waktu 2016-2020 yang berfluktuasi dari 41,60 persen pada tahun (2016) dan 39,38 persen pada tahun (2020), sementara ditahun yang lainnya masing- masing 40,21 persen (2017), 39,73 persen (2018), dan 40,14 persen (2019).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima 2016-2020
Table 13. Trend and Structure of GFCF, Bima Region 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.798,17	4.033,80	4.303,20	4.669,42	4.495,91
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.558,38	2.644,79	2.747,42	2.910,12	2.771,54
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	41,60	40,21	39,73	40,14	39,38
Struktur PMTB ⁹					
a. Bangunan (Miliar Rp)	1.874.657	2.036.546	2.153.822	2.383.862	2.154.751
(persen)	49,36	50,49	50,05	51,05	47,93
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.923.512	1.997.253	2.149.378	2.285.557	2.341.160
(persen)	50,64	49,51	49,95	48,95	52,07
Total PMTB (Miliar Rp)	3.798,17	4.033,80	4.303,20	4.669,42	4.495,91
(persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁰ (persen)					
a. Bangunan	12,46	6,01	2,74	8,35	(9,98)
b. Non Bangunan	2,58	0,78	5,07	1,46	0,78
Pertumbuhan Total PMTB	7,26	3,38	3,88	4,93	(4,76)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas Dasar Harga Berlaku

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bima 2016-2020
Table 14. Trend and Structure of Changes in Inventories, Bima Region 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	36,48	37,70	46,47	48,10	48,97
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18,93	19,27	23,27	23,56	23,44
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	0,40	0,38	0,43	0,41	0,43

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Nilai Perubahan Inventori dari 2016 sampai 2020 berfluktuasi dimana nilai terendah sebesar 36,48 miliar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2020, Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar 48,97 miliar rupiah, tertinggi dalam rentang 5 tahun kebelakang.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Bima secara keseluruhan tidak berubah signifikan. Pada tahun 2016, proporsi perubahan inventori adalah 0,40 persen, selanjutnya 0,38 persen (2017) dan mengalami peningkatan 0,43 persen (2018 dan 2020). Pada tahun 2019 proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Bima berkurang menjadi 0,41 persen. Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyak persediaan barang yang masuk ke kabupaten Bima.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Bima, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Bima 2016-2020
Table 15. Trend of Export, Bima Region 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.493,0	1.713,04	1.999,92	2.196,90	2.319,35
b. ADHK (Miliar Rp)	954,42	1.114,47	1.204,53	1.273,90	1.268,15
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	16,35	17,08	18,46	18,89	20,31
Pertumbuhan ¹¹ (persen)	7,06	16,77	8,05	5,11	(0,45)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara kuantitas, dalam kurun waktu 2016-2020, nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.493,0 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 1.713,04 miliar rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018-2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.999,92 miliar rupiah; 2.196,90 miliar rupiah; dan 2.319,35 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 954,42 miliar rupiah (2016); 1.114,47 miliar rupiah (2017); 1.204,53 miliar rupiah (2018); 1.273,90 miliar rupiah (2019) dan 1.268,15 miliar rupiah (2020). Sementara itu, pada periode 2016 sampai dengan 2020, proporsi nilai ekspor barang dan jasa dalam PDRB terus meningkat dari 16,35 persen pada tahun 2016 menjadi 20,31 persen di tahun 2020.

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 16,77 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 7,06 persen (2016); 8,05 persen (2018); 5,11 persen (2019) dan minus 0,45 persen pada tahun 2020.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Bima. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh penduduk (resident) Kabupaten Bima di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Bima terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total, nilai impor barang dan jasa Kabupaten Bima meningkat (atas dasar harga berlaku) pada kurun tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 5.072,91 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 5.190,59 miliar rupiah, 5.418,02 miliar rupiah pada tahun (2018), 5.682,66 miliar rupiah pada tahun 2019 dan menjadi 5.680,24 miliar rupiah pada tahun 2020.

Proporsi nilai Impor terhadap PDRB Kabupaten Bima lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Secara keseluruhan, proporsi nilai impor terhadap PDRB dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih diatas 50 persen. Tahun 2019 proporsi nilai impor tercatat paling rendah, yaitu sebesar 48,86 persen. Dari sisi pertumbuhan, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,78 persen.

Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Bima 2016-2020
Table 16. Trend of Import, Bima Region 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a.ADHB (Miliar Rp)	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
b.ADHK (Miliar Rp)	2.880,83	2.833,13	2.857,69	2.936,92	2.892,69
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	55,56	51,75	50,02	48,86	49,75
Pertumbuhan ¹² (persen)	(0,67)	(1,66)	0,85	1,78	(1,51)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

<https://bimakab.bps.go.id>

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN BIMA

2016 - 2020

<https://bimakab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bima, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, 2016-2020
Table 17. GRD and GRD perkapita, Bima Region 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
- ADHK 2010	7.143,34	7.590,91	7.897,8	8.233,9	7.946,6
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	19.267,21	20.942,33	22.384,92	23.806,73	23.150,28
- ADHK 2010	15.073,84	15.848,49	16.321,08	16.852,75	16.112,37
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,14	5,14	2,98	3,26	(4,39)
Jumlah penduduk (org)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198
Pertumbuhan penduduk	1,11	1,07	1,03	0,97	0,95

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita secara riil Kabupaten Bima pada periode 2016 s.d 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 15.073,84 ribu rupiah pada tahun 2016 menjadi 16.112,37 ribu rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 besaran PDRB Perkapita mengalami kontraksi sebesar 4,39 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bima tahun 2020 yang juga mengalami penurunan.

4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima 2016-2020
Table 18. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP, Bima Region 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	6.809,50	7.216,36	7.593,48	8.014,82	7.798,81
b. LNPRT	138,89	152,53	169,10	179,44	177,99
c. Pemerintah	1.927,40	2.067,85	2.137,93	2.205,40	2.256,87
Jumlah	8.875,79	9.436,74	9.900,51	10.399,66	10.233,67
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
Proporsi	0,97	0,94	0,91	0,89	0,90

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Seluruh barang dan jasa yang berada di wilayah Bima digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir bahkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir sehingga harus mengimpor dari luar daerah dan luar negeri. Meskipun konsumsi akhir meningkat setiap tahun, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Artinya, laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

4.3 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri dan regional. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara disisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 19. Rasio Ekspor terhadap PMTB (Atas Dasar Harga Berlaku), 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.493,01	1.713,04	1.999,92	2.196,90	2.319,35
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3.798,17	4.033,80	4.303,20	4.669,42	4.495,91
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,39	0,42	0,46	0,47	0,52

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 ekspor selalu mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB, namun terus menunjukkan tren peningkatan. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.4 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya jika rasio semakin besar berarti ketergantungan akan barang impor semakin rendah.

Tabel 20. Rasio PDRB terhadap Impor (Atas Dasar Harga Berlaku), 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB)	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
(Miliar Rp)					
Total Impor (ADHB)	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
(Miliar Rp)					
Rasio PDRB terhadap Impor	1,80	1,93	2,00	2,05	2,01

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2016–2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2019 (2,05). Peningkatan rasio PDRB terhadap Impor menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.5 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 21. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bima, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
%	64,28	65,90	66,66	67,18	66,78
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
%	35,72	34,10	33,34	32,82	33,22
Total Permintaan Akhir¹³ (Miliar Rp)	14.203,45	15.221,28	16.250,10	17.314,08	17.097,90
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk atau sekitar 30 persen masih harus didatangkan dari luar daerah. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 60 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 14.203,45 miliar (2016) menjadi sebesar 17.097,90 miliar rupiah (2020).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 9.130,54 miliar rupiah (2016); 10.030,69 miliar rupiah (2017); 10.832,08 miliar rupiah (2018); 11.631,42 miliar rupiah (2019) dan 11.417,67 miliar rupiah (2020). Akibat produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor.

¹³ Termasuk diskrepansi statistik

4.6 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Tabel 22. Neraca Perdagangan Kabupaten Bima, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.493,01	1.713,04	1.999,92	2.196,90	2.319,35
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
Net Ekspor (X-M) (Miliar Rp)	(3.579,90)	(3.477,56)	(3.418,10)	(3.485,76)	(3.360,89)
Rasio ekspor thdp Impor (%)	0,29	0,33	0,37	0,39	0,41

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantitas. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2016 - 2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bima dengan luar negeri dan antar daerah, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bima selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Bima yang terjadi antara tahun 2016 sampai dengan 2020 tercatat masing-masing sebesar

3.579,90 miliar rupiah (2016), 3.477,56 miliar rupiah (2017), 3.418,10 miliar rupiah (2018), 3.485,76 miliar rupiah (2019) dan 3.360,89 miliar rupiah (2020).

Sementara rasio ekspor terhadap impor dari tahun 2016-2020 selalu dibawah 1 artinya nilai ekspor selalu lebih kecil dibandingkan nilai impor. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 0,29 menjadi 0,33 pada tahun 2017; 0,37 pada tahun 2018; 0,39 pada tahun 2019 dan 0,41 pada tahun 2020.

4.7 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 23. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Bima, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)	7.143,34	7.590,91	7.897,8	8.233,9	7.946,6
(Miliar Rp)					
Perubahan	359,62	447,56	306,88	336,08	(287,28)
(Miliar Rp)					
PMTB (ADHK 2010)	2.558,38	2.644,79	2.747,42	2.910,12	2.771,54
(Miliar Rp)					
ICOR	7,11	5,91	8,95	8,66	(9,65)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2016 sebesar 7,11. Pada tahun 2017 turun menjadi 5,91 dan kembali naik menjadi 8,95 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, besaran ICOR mencapai nilai sebesar 8,66. Pada tahun 2020 nilai ICOR minus 9,65 karena penurunan output dari 8.233,9 miliar rupiah tahun 2019 menjadi 7.946,6 miliar rupiah tahun 2020. Nilai ICOR Kabupaten Bima berkisar 5-8 selama periode tahun 2016 sampai 2019. Hal ini berarti setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak 5-8 unit.

<https://bimakab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bima pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016-2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing- masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bima terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://bimakab.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), Kabupaten Bima 2016-2020

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,809,498	7,216,359	7,593,479	8,014,822	7,798,809
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138,892	152,531	169,101	179,436	177,993
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,927,403	2,067,851	2,137,931	2,205,403	2,256,872
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,798,169	4,033,799	4,303,200	4,669,419	4,495,911
5. Perubahan Inventori	36,483	37,704	46,475	48,098	48,973
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3,579,904	-3,477,556	-3,418,103	-3,485,755	-3,360,889
PDRBe	9,130,540	10,030,687	10,832,083	11,631,422	11,417,669

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah), Kabupaten Bima 2016 - 2020

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,173,688	5,270,972	5,381,985	5,537,916	5,340,046
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105,093	111,209	119,038	123,138	121,131
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,213,670	1,263,321	1,279,234	1,302,149	1,314,972
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,558,379	2,644,790	2,747,419	2,910,119	2,771,544
5. Perubahan Inventori	18,927	19,269	23,271	23,561	23,438
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,926,415	-1,718,656	-1,653,157	-1,663,018	-1,624,540
PDRBe	7,143,341	7,590,905	7,897,788	8,233,865	7,946,590

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (persen)

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.58	71.94	70.10	68.91	68.30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.52	1.52	1.56	1.54	1.56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.11	20.62	19.74	18.96	19.77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41.60	40.21	39.73	40.14	39.38
5. Perubahan Inventori	0.40	0.38	0.43	0.41	0.43
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-39.21	-34.67	-31.56	-29.97	-29.44
PDRBe	100	100	100	100	100

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020 (persen)

Kategori	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.64	1.88	2.11	2.90	-3.57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.15	5.82	7.04	3.44	-1.63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.01	4.09	1.26	1.79	0.98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.26	3.38	3.88	5.92	-4.76
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRBe	5.30	6.27	4.04	4.26	-3.49

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://bimakab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bima**
BPS - *Statistics of Bima Regency*
Jl. Soekarno-Hatta, Woha - Bima
NTB 84171 Telp/Fax (0374) 646003
Email : bps5206@bps.go.id
Homepage : <http://bimakab.bps.go.id>